



Konstruksi Politik Identitas Pangung Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Mandailing Natal

¹Muhammad Iqbal, ²Hasan Sazali, ³Mohd. Rafiq

^{1,3}Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University, Padangsidempuan, Indonesia
Sumatera Utara State Islamic University, Indonesia

liqbalpenyuluh@gmail.com, hasansazali@uinsu.ac.id, mohd.rafiq@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

Elections for village heads are part of the implementation of a democratic system as a ground-level election that touches the community. As Indonesians, we both have the right to express opinions and we can choose anyone to be our leader. Everything is regulated in state regulations. When a candidate for village head is elected, this is done directly by the people included in the election data. It is undeniable that the election for village head candidates is often tinged with identity-political overtones. Such a policy was made so that the winning team could later win the political polemic. In fact, there were many incidents when political battles occurred in various places, one of which was in Mandailing Natal Regency. Not only identity politics, but also other identity politics such as ethnic, religious and cultural identity. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Then the sources and data collection techniques were carried out using interview techniques. In addition, this research was conducted with secondary data by reviewing literature from several journals and references from online media. The study concluded that part of identity politics in Mandailing Natal District is an emphasis on ethnic, cultural and religious identity. In fact, the presence of monetary/money policies was inevitable in the political upheaval that occurred in several villages in Mandailing Natal District.

Keywords: Identity Politics, Democracy, Village Head Election, Ethnic Identity Politics

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari penerapan sistem demokrasi sebagai pemilu tingkat bawah yang menyentuh masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita sama-sama berhak mengutarakan pendapat dan bisa memilih siapa saja untuk menjadi pemimpin kita. Semuanya diatur dalam peraturan negara. Ketika calon kepala desa terpilih, hal itu dilakukan langsung oleh masyarakat yang masuk dalam data pemilu. Tidak dapat dipungkiri, pemilihan calon kepala desa seringkali diwarnai dengan nuansa politik identitas. Kebijakan seperti itu dibuat agar tim pemenang nantinya bisa memenangkan polemik politik. Faktanya, banyak kejadian pertarungan politik yang terjadi di berbagai tempat, salah satunya di Kabupaten Mandailing Natal. Tidak hanya politik identitas, namun juga politik identitas lainnya seperti identitas suku, agama, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan data sekunder dengan meninjau literatur dari beberapa jurnal dan referensi dari media online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagian dari politik identitas di Kabupaten Mandailing Natal adalah penekanan pada identitas etnis, budaya, dan agama. Kehadiran kebijakan moneter/money ternyata tidak dapat dihindari dalam gejolak politik yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci: Politik Identitas, Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa, Politik Identitas Etnis

PENDAHULUAN

Dalam sejarah bangsa terjadi pemberontakan mengenai suku dan ideologi bahkan adanya keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia di antaranya adalah adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada tahun 1960, kemudian adanya pemberontakan G 30 S/PKI dan sebagainya. Berawal dari sinilah munculnya istilah politik identitas di Indonesia (Lestari, t.t.: 154).

Salah satu ajang demokrasi di bangsa ini adalah pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades merupakan pemilihan secara langsung yang diperuntukkan untuk warga agar mereka memilih secara bebas, baik ia berpendapat maupun memilih siapa yang akan menjadi pemimpinya. Hal ini sudah diatur pada Undang-undang yang ada di negara ini. Sistemnya sudah diatur pemerintah, dan pemilihan itu merupakan hak rakyat dalam berdemokrasi.

Dalam ajang kontestasi pemilihan calon kepala desa telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemilihan kepala desa pada masa dulu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Akan tetapi, dalam konteks saat ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang mana setiap warga masyarakat yang ada di desa mempunyai hak suara sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa sering terjadi progres bumbu-bumbu politik apalagi dengan politik identitas dengan misi supaya dapat mencapai tujuannya yang pragmatis seperti pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal (Dianto, 2022). Politik identitas suku dan etnik memainkan peranannya supaya dapat memenangkan kontestasi politik dengan memperoleh suara terbanyak sehingga mampu mengantarkan mereka pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022.

Dalam sebuah proses politik dapat menimbulkan reaksi tumbuhnya beberapa kelompok saling berhadapan dan bersaing siapa

yang akan mendominasi perhelatan dalam panggung demokrasi pemilihan kepala desa tersebut. Dalam panggung demokrasi pemilihan kepala desa tentu adanya proses politik yang matang supaya dapat menjadi sebuah kekuatan politik. Proses politik tersebut akan memainkan beberapa faktor identitas politik, sehingga ini menjadi sebuah pertarungan (Nasrudin & Nurdin, 2019: 37). Kini dapat dilihat bagaimana seorang kontestan mengelola isu etnis, suku dan agama agar menjadi sebuah kekuatan dalam pertarungan politik.

Proses politik identitas ini dapat memicu persoalan dalam pesta demokrasi, baik ia pemilihan umum tingkat negara, kepala daerah maupun setingkat kepala desa. Politik identitas ini akan mengelola isu suku, etnis dan agama bahkan budaya yang ada di masyarakat, tentunya dengan satu tujuan yaitu mengumpulkan kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa.

Politik identitas dengan peranannya di tengah-tengah masyarakat akan mempunyai dampak positif dan tidak terlepas dari dampak negatif. Positifnya akan menimbulkan kecintaan pada golongan demi kepentingan bersama. Namun, nilai negatifnya adalah akan menimbulkan reaksi pada masyarakat sedikit terpecah belah, dapat mengancam sebuah kerukunan, kurangnya responsif terhadap lawan politik, bahkan yang paling parah dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Perhelatan ini tentunya nanti harus mendapatkan respon cepat untuk memulihkan kembali kondisi masyarakat yang sempat terpecah belah, harus mampu menyatukan kepentingan masyarakat supaya pembangunan desa berjalan dengan baik,

karena tanpa demikian pembangunan menjadi terancam gagal jika kondisi masyarakat tidak stabil.

Indonesia mempunyai pedoman yang harus dipegang teguh dan menjadi dasar dan pondasi kebangsaan. Pengamalan dari nilai-nilai isi dari Pancasila untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa. Nilai ini semestinya tidak dirusak dengan perbedaan identitas politik. Indonesia dengan beragam suku, ras, etnis dan agama menjadi salah satu keragaman yang harus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai gara-gara politik yang tidak sehat sehingga menjadi ancaman bagi bangsa dan negara.

Sentimen politik yang tidak sehat akan menjadi masalah besar apalagi dalam ajang pemilihan calon kepala desa. Konstruksi politik seperti ini akan menuai polemik dan sentimen pribadi maupun kelompok. Perbedaan persepsi itu hal yang biasa terjadi, namun apakah warga bisa menerima ketika calonnya nanti yang akan menang atau kalah. Politik identitas akan memberikan pandangan bahwa nanti pada pemilihan umum siapa yang akan terpilih, dari keluarga mana yang akan dipilih, etnis apa, bahkan akan mengutamakan yang seagama dengan dirinya.

Fenomena saat sekarang adalah banyaknya terjadi politik uang. Dengan politik uang sangat mempengaruhi pilihan masyarakat. Boleh dikatakan dengan politik uang lawan politik pun akan berbalik arah. Sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa politik uang mampu mengubah segalanya. Kejadian seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, bahkan tidak ada uang akan terjadi pemilih tidak akan mau untuk memilih siapa pun calon yang akan mejadi pilihannya nanti.

Sutopo dalam tulisannya tentang Pilkades langsung dalam tinjauan fiqh siyasah menjelaskan dominasi permainan politik uang (politik moneter) di desa-desa menjelang pemilu justru mengaburkan esensi demokrasi itu sendiri, karena hasil pemilu tidak lagi otentik menurut hati nurani. Selain itu melahirkan pemimpin yang tidak amanah (bertanggung jawab) karena pengorbanan menjadi kepala desa tidak datang dengan tangan kosong melainkan dengan harga yang mahal (Sutopo, 2021: 185).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik Identitas Etnis dalam Pemilihan Pemimpin di Kabupaten Mandailing Natal

Persoalan politik apalagi politik identitas yang menyangkut isu kesenjangan sosial, ketidakadilan, merupakan ketidakmampuan penguasa dalam mempertemukan antara gagasan agama dengan pemikiran politik. Sebagai faktor utama seseorang dalam membentuk identitas kelompok serta membangun kekuatan-kekuatan sosial akan cenderung timbulnya dorongan konflik politik atau kekuasaan (Khamdan & Wiharyani, 2018: 203).

Di samping itu, politik identitas merupakan salah satu tindakan politik yang mempunyai strategi dengan membawa berbagai simbol-simbol identitas yang dapat digunakan sebagai senjata utama dalam melaksanakan praktik politik misalnya dengan menguatkan berbagai argumentasi, sekaligus mematahkan argumentasi lawan, sehingga dapat

menjatuhkan lawan politik (Tutukansa, 2022: 7). Praktik politik identitas misalnya membawa isu tentang budaya atau kultural, kemudian isu etnisitas, dan bahkan mengangkat isu-isu lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Begitu juga ketika dalam pemerintahan harus ada yang mengatur hidup manusia. Politik adalah salah satu wadah untuk mengatur kehidupan bernegara. Menurut Zulifan yang mengutip dari Syadzali dalam politik Islam di Indonesia menjelaskan bahwa untuk menempati posisi politik diperlukan manusia yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan dan kearifan yang mendalam dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab yang lain (Zulifan, 2016: 174)

Berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan penelitian dan hasil beberapa wawancara dengan warga setempat di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data lapangan, diperoleh informasi bahwa politik identitas etnis Kabupaten Mandailing memberikan dampak yang signifikan di ranah politik, terutama dari perolehan suara mereka yang bertarung dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mandailing. Dari sini, dapat digali cara kerja, atau bahkan strategi, masing-masing calon kepala desa dan kelompok suksesinya, termasuk taktik manipulasi dan mobilisasi, kontrol sosial, dan solidaritas politik.

Mobilisasi dan Manipulasi Politik

Edy Sofian, dkk. mengutip dari Supriatma menjelaskan bahwa politik identitas adalah politik yang cenderung mengelompokkan dan

memecah belah. Politik identitas bisa lebih efektif dalam memobilisasi pemilih. Namun, kebijakan semacam itu membutuhkan penerimaan satu kelompok dan penggulingan kelompok lain. Ini sering terjadi saat kampanye. Peniru cenderung lebih sulit dikendalikan. Peristiwa dan perebutan identitas biasanya brutal, dan sulit bagi mereka yang keluar untuk pulih dari rasa sakit pasca pemilu (Syofian dkk., t.t.: 7).

Mobilisasi politik di Indonesia mengalami perubahan. Peran etnis, suku dan daerah mungkin agak berubah, tetapi peran agama tetap. Dahulu dan sekarang, agama dan identitas keagamaan tetap menjadi basis mobilisasi politik dan legitimasi kekuasaan (Tawakkal, t.t.: 63). Bagian dari peran politik identitas etnis dalam fase demokrasi pilkada adalah menerapkan sistem yang terstruktur dan terorganisir, menggunakan taktik untuk membawa individu atau bahkan komunitas ke kesetaraan etnis guna memperkuat suara mayoritas. Fakta politik identitas telah menjadi bagian dari strategi komunitas atau sesuatu yang terpolarisasi.

Melihat sebuah strategi politik identitas di Kabupaten Mandailing Natal sangat terorganisir dengan pendekatan intensif. Secara instrumental, makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya mempolitisasi etnis untuk mengejar kepentingan politik. Namun, ketika identitas ini berubah menjadi konflik kepentingan, maka dapat dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang politis. Ketika identitas dipolitisasi, identitas menjadi kepentingan. Dapat dikatakan bahwa munculnya politik identitas disebabkan adanya komunitas dengan berbagai kepentingan. Realitas politik identitas terlihat pada etnisitas, khususnya di Kabupaten

Mandailing Natal, dipolitisasi atau dijadikan alat untuk keuntungan ekonomi dan politik.

Dengan demikian, etnis tidak lagi disebut sebagai kelompok etnis yang memperjuangkan upaya penegakan. Namun, lebih dari identitas etnis dapat digunakan sebagai alat di bidang politik. Sangat menarik untuk dilihat karena menunjukkan paradoks demokrasi dimana di satu sisi kebebasan dan berbagai golongan dapat dijamin, di sisi lain kebebasan dan keragaman ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Politik Dominasi Sosial

Menurut Gramsci yang dikutip oleh Hary Sulistyو menjelaskan bahwa kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*) menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh beberapa konsep. Pertama, dominasi dan kepemimpinan dilakukan terhadap segenap lawan politik. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negara, atau kekuasaan pemerintahan. Ketiga, kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi pada kelas ini, baik ia pada pengarahan maupun dominasi, terus berlanjut. Kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu dominasi (*dominio*) atau paksaan (*coercion*) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral (Sulistyo, 2018: 30).

Makhluk multidimensi yaitu manusia yang ditandai oleh beberapa faktor yang terdiri dari karakteristik fisiologis, budaya, ekonomi dan perilaku. Dari perbedaan tersebut, orang dapat bergabung dengan

kelompok sosial tertentu untuk menciptakan masyarakat multikultural. Sementara itu, teori identitas sosial dapat menunjukkan terhadap perilaku kelompok terhadap suatu perilaku sosial dan dapat dipandang juga bahwa adanya suatu interaksi antara proses psikologis dan sosial yang bersifat fungsional (Tutukansa, 2022: 3).

Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal termasuk multietnis dan kultur dimana setiap individu dapat menunjukkan dirinya di masyarakat karena etnisitasnya. Pertimbangan populasi etnis menjadi alat politik yang digunakan sebagai dasar untuk memprioritaskan pemilihan komunitas berdasarkan etnis. Kebijakan yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terbukti sejak periode pertama pemilihan kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal, etnisitas dapat menjadi aspek politik dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa dan dominasi sosial dalam politik identitas tersebut.

Politik Solidaritas

Pengertian dari solidaritas secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan, simpati, empati, serta tenggang rasa (Dila, 2022: 57). Ada beberapa tinjauan pustaka yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Konsep solidaritas sosial menurut Emil Durkheim yang dikutip oleh Luluk Dwi Kumalasari menjelaskan bahwa solidaritas sosial tercipta karena persamaan nilai, persamaan tantangan dan juga persamaan kesempatan setara yang didasari oleh harapan dan kepercayaan (Kumalasari, t.t.,: 1115).

Strategi solidaritas politik dapat digambarkan sebagai fenomena postmodern. Dari gejala ini dapat dilihat melalui adaptasi kekuatan sosial dalam politik. Politik menjadi alat untuk mencapai tujuan, yang didukung oleh berbagai aspek. Dari perspektif yang berbeda tersebut, elit politik harus dilibatkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam kerangka liberalisasi politik. Di Kabupaten Mandailing Natal, etnisitas dimasukkan ke dalam politik dan menjadi contoh etnisitas menjadi alat untuk merebut kekuasaan atau bahkan mendapatkan suara terbanyak dalam politik. Secara logika gerakan sosial akan menjadi sangat efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu termasuk dalam pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu, ketika sudah terbentuk solidaritas sosial maka akan semakin mudah untuk melangkah dan membuat program, apalagi dilakukan dengan mempunyai tujuan dan kepentingan bersama.

Pengaruh Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal

Peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara dan observasi, setelah itu mendapatkan peran politik identitas etnis. Berdasarkan identitas politik, masing-masing memiliki implikasi positif dan negatif. Sebagai perilaku politik lokal di Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan dinamis. Dengan berbagai cara dilakukan oleh para calon kepala desa dengan mempengaruhi warga desa untuk menumbuhkan rasa simpati kepada masing-masing calon. Dengan demikian terjalin komunikasi yang baik di antara mereka.

Ketika politik identitas menjadi sebuah gerakan, pada dasarnya merekonstruksi sebuah narasi besar yang pada dasarnya membangun sebuah teori yang mengatur faktor-faktor biologis sebagai komponen dari banyak perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupan. Gerakan politik identitas cenderung membangun *apartheid* terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak dapat dicapai sebagai salah satu tujuan gerakan, pemisahan dan penanaman diri diambil sebagai jalan keluar (Habibi, 2018: 7).

Hakim dalam tulisannya Islam dan demokrasi memberikan penjelasan bahwa prinsip dari sebuah demokrasi adalah dimana seorang pemimpin itu didasarkan pada suara terbanyak. Konsep seperti ini dapat mendorong tampilnya pemimpin yang dipilih atas dasar popularitas dan bukan berdasarkan kualitas, apalagi kualitas spiritual. Namun, tidak ada jaminan bahwa orang yang populer adalah yang terbaik, tetapi bisa juga terjadi sebaliknya (Hakim, 2014: 11).

Ardipandanto pernah membahas dalam jurnalnya berjudul dampak politik identitas pada Pilpres 2019 menjelaskan bahwa politisi harus fokus pada narasi politik yang lebih solid yang mempersatukan dan mendamaikan pendukungnya dengan mengutamakan rasionalitas di atas emosionalitas atau kepentingan kelompok agama tertentu (Ardipandanto, 2020: 45).

Ada beberapa peluang kekacauan dalam pemilihan kepala desa. Dari gejala ini, masyarakat dapat terbelah karena perbedaan kepentingan. Begitu pula sebaliknya, di satu sisi, orang yang

memenangkan perlombaan politik lebih stabil, dll. Peristiwa semacam itu sangat pragmatis karena dinamika politik dapat mengarah pada perpecahan sosial. Tingkat solidaritas politik berdasarkan kepentingan kekuasaan. Padahal, kesadaran akan persamaan dan perbedaan dalam masyarakat, berdasarkan faktor politik yang berbeda, menimbulkan sikap etnosentris pada masing-masing suku. Lebih lanjut, pembalikan ini hanya terjadi pada tahun-tahun politik.

Persaingan antara satu komunitas etnis dengan komunitas lainnya, yang kemudian memicu konflik berbasis etnosentrisme, yang berujung pada perpecahan, bahkan pengkotak-kotakan antar warga. Namun, konflik tersebut tergolong konflik ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga penyelesaian konflik tersebut tergantung pada kesadaran kelompok etnis yang berkonflik. Begitu juga harus ada kebijakan kepada pemimpin masyarakat yang terpilih. Kalau tidak demikian permasalahan akan berlarut-larut dan dapat mengancam mandeknya pembangunan pada masyarakat (Dianto, 2022).

Menurut Setiadi & Kolip yang dikutip oleh Busyair Ahmad menjelaskan bahwa konflik kepentingan sangat identik dengan konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat, kemudian di pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan sebuah kekuasaan dan kewenangan di tangan mereka (Ahmad, 2016: 40).

Dari beberapa ulasan bahwa politik identitas dari sebuah kontestasi yang dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal tersebut mendominasi kepada penggunaan nilai-nilai Islam, berdasarkan dari hasil penelitian hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- a. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal sehingga dengan mengkonstruksikan nilai-nilai Islam merupakan sebuah identitas politik yang akan memudahkan para calon kepala desa untuk memudahkan dukungan dari mayoritas masyarakat.
- b. Nilai-nilai Islam telah menjadi bagian dari integral budaya masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, bahkan masyarakat pedesaan dapat menilai baik atau buruknya kepribadian seseorang dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam sehingga para calon kepala desa akan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas politiknya.
- c. Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala desa yang dilakukan sebelumnya, masyarakat memiliki kecenderungan mendukung calon kepala desa yang mempraktekan nilai-nilai Islam seperti misalnya mereka memilih karena kesalehan pribadinya. Memilih calon kepala desa yang paling rajin, baik dan shaleh, sehingga dengan pengalaman tersebut dapat dijadikan standar keberhasilan oleh para calon kepala desa untuk memenangkan kontestasi politik.

Ketika terjadi suatu konflik dalam pemilihan kepala desa, maka

dalam penyelesaian konflik sebagaimana dikutip oleh Taufik dan Hamrun melalui pendekatan Hardjana, A. M menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dengan mengemukakan teknik-teknik yaitu: (1) Bersaing (*compotiting*) (2) Kerja sama (*collaboratioing*) (3) Kompromi (*compromising*) (4), Menghindari (*avoiding*), dan (5) Menyusuaikan (*acomonding*) (Taufik & Hamrun, 2018: 19).

Di balik politik identitas ada juga praktik politik uang (*money politic*) dan kampanye hitam (*balck campaign*) di tingkat lokal semakin hangat, sebagaimana yang terjadi di beberapa kecamatan pada saat pemilihan kepala. Berdasarkan wawancara dengan warga maupun pengakuan beberapa warga berbeda kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal bahwa salah satu calon menggunakan politik uang. Hal itulah sebagai pemicu terjadinya konflik yang dapat memicu tindakan anarkis pada pemilihan kepala desa. Adapun penyebab terjadinya konflik tersebut berawal dari kekecewaan sebagai warga pendukung salah satu calon yang dinyatakan kalah sehingga melakukan konflik dan hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan dari sebagian warga yang tidak menerima kekalahan. Inilah yang menjadi alasan munculnya konflik dalam pemilihan kepala desa karena adanya ketidakpuasan salah satu dari pendukung atau simpatisan calon yang tidak terpilih dan menganggap calon terpilih curang dengan menggunakan politik uang.

PENUTUP

Pemilihan kepala desa yang dipilih langsung merupakan bagian dari kemajuan demokrasi bangsa ini, sejarah mengajarkan bahwa selama 32 tahun suara rakyat dibelenggu oleh otoritarianisme. Namun di sisi lain, tantangan yang akan datang bukannya semakin mudah, malah semakin sulit. Politik identitas merupakan salah satu alat politik dalam sistem pemilihan pemimpin negara ini. Melihat fenomena yang ada lebih jauh lagi ke depan hal yang demikian seharusnya dikontrol dan diformulasikan secara baik.

Politik identitas bukan hanya terjadi pada pemilihan kepala desa saja, akan tetapi pada seluruh ajang demokrasi, karena semuanya ada kepentingan politik masing-masing. Menjadi ancaman nepotisme dimana suku, ras, dan agama menjadi acuan untuk maju dalam perjuangan memilih pemimpin di desa. Politik identitas sering berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pemilihan kepala desa sehingga menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan pertentangan kepentingan politik masyarakat. Warga memilih calon pemimpinnya berdasarkan garis keturunan, misalnya saja si calon lahir dari keluarga siapa, bagaimana agamanya, apa *marga* atau suku, secara adat bagaimana perannya, dan lain sebagainya. Fakta baru bahwa pemimpin yang terpilih di desa itu yang banyak pengaruhnya, seperti; orang yang sering datang silaturahmi, dan penyakit yang paling utama bagi mereka yang mampu memberikan saweran politik atau dengan istilah serangan fajar, kemungkinan besar yang akan menjadi kandidat terkuat yang akan memenangkan kontestasi politik tersebut. Sebaiknya nilai yang diambil dari permasalahan ini adalah

ketika akan memilih seorang pemimpin negara, daerah, desa, sekalipun tingkat yang paling rendah seyogianya seseorang harus bisa menilai bagaimana dirinya bertindak dan memimpin dengan baik dan benar.

Menciptakan suasana tenang dan memperhatikan masyarakat desa adalah tugas bersama yang dinakhodai oleh seorang pemimpin. Politik identitas ada sisi positifnya yang dapat berdampak baik untuk menjalankan roda pemerintahan demi terciptanya suasana masyarakat yang terorganisir. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, bisnis, politik, bahkan pemerintahan. Kenyataannya adalah banyak dijumpai perseteruan di antara mayoritas dan minoritas. Terjadinya sebuah diskriminasi identitas menjadi aktor utama terjadinya konflik. Bukan hanya politik identitas yang melatarbelakangi panggung demokrasi atau pilkada, politik uang juga menjadi tantangan dalam sebuah ajang pemilihan kepala desa. Dapat dipastikan bahwa siapa yang akan melaju duluan dan meraih suara terbanyak karena pengaruh ekonomi, masyarakat yang kurang mampu tentunya akan tergiur dengan iming-iming uang tersebut sehingga mengesampingkan bagaimana pemimpin nantinya apakah membawa perubahan yang baik atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah*

Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 11(1), 43–63.
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

Busyairi Ahmad. (2016). Konflik dalam Dinamika Politik Pedesaan (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB). *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(1), 37–46.
<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i1.14>

Dianto, I. (2019). Hambatan Komunikasi Antar Budaya: Menarik Diri, Prasangka Sosial dan Etnosentrisme. *Hikmah*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.24952/hik.v13i2.1847>

Dianto, I. (2022). Hambatan Sosio-Politik Pembanguan Desa Religius di Kabupaten Mandailing Natal. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.291-314>

Dianto, I., Bakti, A. F., & Rosyidin, I. (2021). Ideological and media discourse study of Nasrudin Joha's political article. *Islamic Communication Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.8140>

Dila, B. A. (2022). Bentuk Solidaritas Sosial dalam Kepemimpinan Transaksional. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 2(1), 55–66.
<https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2749>

Habibi, M. (2018). *Analisis Politik Identitas di Indonesia* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>

Hakim, I. N. (2014). *Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat*. 1.

Khamdan, Muh., & Wiharyani, W. (2018). Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 193. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1198>

Kumalasari, L. D. (t.t.). *Makna Solidaritas Sosial dalam Tradisi Sedekah Desa (Studi pada Masyarakat Desa Ngogri Megaluh Jombang)*.

Lestari, F. (t.t.). *Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dalam Pemilu*.

Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>

Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, & Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1). <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3>

Sulistyo, H. (2018). Representasi Konflik Politik 1965 dalam Cerpen Susuk Kekebalan karya Han Gagas. *Jurnal POETIKA*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.22146/poetika.35611>

Supriyadi, M. (t.t.). *Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan*.

Sutopo, U. (2021). Pilkada Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkada Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2591>

Syofian, E., Kusmanto, H., & Amin, M. (t.t.). *Identity Politics in the 2018 Regional Head Elections for the Governor and Deputy Governor of North Sumatra*.

Taufik, A. & Hamrun. (2018). *Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bjruv>

Tawakkal, G. T. I. (t.t.). *Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*.

Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 66. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>

Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171–195. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>

Konstruksi Politik Identitas Panggung Demokrasi Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Mandailing Natal